PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA BILA RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Andi Fadil[1], Sapri[2], Sundari[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia
Email: andfadil795@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemerintah desa dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, implementasi BLT Dana Desa, serta pengaruh komunikasi terhadap implementasi BLT di Desa Bila Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data dikumpulkan melalui observasi, studi pustaka, dan kuesioner yang dibagikan kepada penerima BLT Dana Desa (populasi 25 orang, total sampling). Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS. Variabel komunikasi diukur melalui kejelasan informasi, konsistensi informasi, dan intensitas komunikasi, sedangkan implementasi BLT diukur melalui ketepatan waktu, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan prosedur, dan pencapaian tujuan program. Hasil analisis sementara menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,493 (lebih besar dari 0,05) dengan koefisien determinasi sebesar 3,7%. Dengan demikian, komunikasi belum terbukti berpengaruh signifikan secara statistik terhadap implementasi BLT. Hasil ini bersifat sementara dan perlu dikonfirmasi melalui analisis data lengkap seluruh responden.

Kata Kunci: Komunikasi, Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa.

Abstract

This study aims to examine village government communication in the implementation of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT), the implementation of the assistance program, and the influence of communication on its implementation in Bila Riase Village, Sidenreng Rappang Regency. This study used a quantitative method with an associative approach. Data were collected through observation, literature review, and questionnaires distributed to the 25 recipients of Village Fund BLT (total sampling). Data were analyzed using descriptive statistics and simple linear regression with SPSS. Communication was measured through information clarity, information consistency, and communication intensity, while BLT implementation was measured through timeliness of distribution, accuracy of the assistance amount, procedural accuracy, and achievement of program objectives. The preliminary analysis showed a significance value of 0.493, which is greater than 0.05, with a coefficient of determination of 3.7%. These preliminary findings do not indicate a statistically significant influence of communication on the implementation of BLT. The findings need to be confirmed through further analysis using complete data from all respondents.

Keywords*: Communication, Implementation, Direct Cash Assistance, Village Fund.*

A. PENDAHULUAN

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan kebijakan sosial yang berlandaskan amanat konstitusi untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat, khususnya kelompok

miskin dan rentan. Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan BLT hadir sebagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi beban ekonomi akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil (Hidayat, 2021). Pada tingkat desa, pelaksanaan BLT berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan terbuka, serta pada regulasi yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyaluran bantuan sosial (Peraturan Presiden, 2020). Karena itu, pemerintah desa berkewajiban menyampaikan informasi kebijakan secara jelas dan mudah dipahami, sehingga komunikasi kebijakan menjadi bagian penting bagi keberhasilan implementasi BLT.

Komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan BLT tidak hanya menyangkut penyampaian informasi tentang bantuan, tetapi juga proses musyawarah dan keterlibatan masyarakat dalam penetapan penerima manfaat. Namun, pelaksanaan BLT di Desa Bila Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan. Penyampaian informasi cenderung dilakukan satu arah melalui aparat desa tanpa penjelasan yang mendalam mengenai dasar penetapan penerima bantuan, dan musyawarah desa belum dilaksanakan secara optimal sehingga partisipasi masyarakat dalam penetapan penerima BLT masih terbatas. Kondisi tersebut menimbulkan keluhan berupa rasa ketidakadilan dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah desa (Putri & Nurmandi, 2021), serta melemahkan legitimasi kebijakan dan berpotensi memicu konflik sosial (Rahman & Syamsuddin, 2022).

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pengaruh komunikasi terhadap implementasi BLT dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang memandang komunikasi sebagai salah satu variabel penentu keberhasilan implementasi. Komunikasi yang jelas, konsisten, dan berkesinambungan dapat meminimalkan distorsi informasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme kebijakan.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis komunikasi pemerintah desa dalam pelaksanaan BLT Dana Desa di Desa Bila Riase, implementasi BLT Dana Desa ditinjau dari aspek pelaksanaan, transparansi, dan pemahaman masyarakat penerima bantuan, dan pengaruh komunikasi pemerintah desa terhadap implementasi BLT Dana Desa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai proses yang dipengaruhi oleh pemahaman, sikap, dan tindakan para pelaksana kebijakan di lapangan. Dalam program BLT, implementasi mencakup proses pendataan, sosialisasi, penyaluran, serta pengawasan agar bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai ketentuan.

Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh variabel yang saling berkaitan, yaitu kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antarpelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta sikap atau disposisi pelaksana. Apabila salah satu variabel tidak berjalan baik, pelaksanaan kebijakan berpotensi terhambat. Komunikasi yang jelas dan konsisten diperlukan agar isi kebijakan, tujuan, dan prosedur dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat sasaran, sedangkan kurangnya komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaktepatan pelaksanaan. Dalam penelitian ini, komunikasi pemerintah desa diukur melalui tiga indikator berikut:

1. Kejelasan informasi. Indikator ini menunjukkan sejauh mana tujuan, ketentuan, dan prosedur BLT Dana Desa dijelaskan secara jelas, terbuka, dan mudah dipahami oleh masyarakat penerima manfaat.
2. Konsistensi informasi. Indikator ini menunjukkan sejauh mana informasi BLT yang disampaikan pemerintah desa konsisten, tanpa perbedaan antara informasi yang dimiliki aparat desa dan masyarakat.
3. Intensitas komunikasi. Indikator ini menunjukkan seberapa sering dan seberapa tepat waktu pemerintah desa memberikan sosialisasi dan informasi terkait BLT Dana Desa sebelum penyaluran.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program bantuan sosial pemerintah bagi masyarakat miskin dan rentan sebagai bentuk perlindungan sosial, yang bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan menjaga daya beli rumah tangga pada kondisi ekonomi yang sulit (Peraturan Presiden, 2020). Pelaksanaannya dilakukan melalui pendataan penerima, penetapan kriteria, dan penyaluran langsung yang menuntut ketepatan waktu, jumlah, dan prosedur (Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020). Dalam penelitian ini, implementasi BLT diukur melalui ketepatan waktu penyaluran, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan prosedur, dan pencapaian tujuan program.

Keberhasilan BLT tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan, tetapi juga oleh bagaimana program diimplementasikan di tingkat desa. Komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan penerima manfaat akan meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat sehingga bantuan tepat sasaran (Van Meter & Van Horn, 1975). Berdasarkan kerangka tersebut, hipotesis penelitian ini adalah Ha: komunikasi berpengaruh terhadap implementasi BLT di Desa Bila Riase, dan H0: komunikasi tidak berpengaruh terhadap implementasi BLT.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif karena bertujuan mengukur dan menganalisis pengaruh komunikasi pemerintah desa (variabel independen, X) terhadap implementasi BLT Dana Desa (variabel dependen, Y) berdasarkan data numerik dari responden (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dipilih karena melaksanakan program BLT Dana Desa, tersedianya data, dan keterjangkauan lokasi.

Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat penerima BLT Dana Desa di Desa Bila Riase yang, berdasarkan data pemerintah desa, berjumlah 25 orang. Sampel ditentukan dengan teknik total sampling, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel karena jumlahnya relatif kecil, sehingga sampel berjumlah 25 responden.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi di Kantor Desa Bila Riase, studi pustaka untuk memperoleh data sekunder dari buku, jurnal, dan sumber relevan lainnya, serta kuesioner berisi 20 pernyataan (10 butir variabel X dan 10 butir variabel Y) yang dibagikan langsung kepada responden. Jawaban diukur dengan skala Likert lima tingkat, dari sangat setuju (skor 5) sampai sangat tidak setuju (skor 1) (Tanujaya et al., 2023).

Data dianalisis dengan IBM SPSS Statistics 21 melalui statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), dan analisis regresi linear sederhana dengan persamaan $Y = a + bX$ (Sugiyono, 2019). Kategori jawaban ditentukan berdasarkan interval skor skala Likert (0,8) dan interval persentase (20%). Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha ≥ 0,60 (Ghozali, 2018). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dan uji F pada taraf signifikansi 0,05.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian adalah penerima BLT Dana Desa di Desa Bila Riase yang berjumlah 25 orang (total sampling), terdiri atas 14 laki-laki (56%) dan 11 perempuan (44%), dengan kelompok umur terbanyak 30–39 tahun (32%). Desa Bila Riase berpenduduk 1.240 jiwa yang tersebar di tiga dusun, yaitu Dusun Bila, Riase, dan Lombo. Tanggapan responden diolah dengan skala Likert dan dikategorikan menurut interval persentase (81–100% sangat baik; 61–80% baik; 41–60% kurang baik; 21–40% tidak baik; 0–20% sangat tidak baik).

Pada variabel komunikasi pemerintah desa, rekapitulasi sementara menunjukkan seluruh indikator berada pada kategori baik, yaitu kejelasan informasi (75,6%), konsistensi informasi (74,5%), dan intensitas komunikasi (76,0%), dengan rata-rata 75,4%. Pada butir bahasa yang mudah dipahami dan sosialisasi BLT, sekitar dua pertiga responden menjawab setuju atau sangat setuju. Namun, pada butir pemahaman dan keterbukaan informasi, banyak responden masih menjawab ragu-ragu (33% dan 53% pada hasil sementara 15 responden).

Pada variabel implementasi BLT Dana Desa, rekapitulasi sementara menunjukkan indikator ketepatan waktu penyaluran berada pada kategori sangat baik (84,0%), sedangkan ketepatan prosedur (66,7%) dan pencapaian tujuan program (75,0%) berada pada kategori baik, dengan rata-rata 75,2%. Butir transparansi proses penetapan penerima memperoleh persentase terendah (61%), dan banyak responden menjawab ragu-ragu atau tidak setuju terkait kesesuaian proses penyaluran dengan aturan serta transparansi penetapan penerima BLT.

Hasil tersebut belum final. Output SPSS yang tersedia baru memuat tiga butir variabel X dan empat butir variabel Y dari 15 responden, sedangkan instrumen terdiri atas 10 butir per variabel dan sampel penelitian berjumlah 25 responden. Karena itu, skor total dan kategori akhir kedua variabel belum dapat ditetapkan.

Pengaruh komunikasi terhadap implementasi BLT diuji dengan regresi linear sederhana (Ha: komunikasi berpengaruh terhadap implementasi BLT; H0: komunikasi tidak berpengaruh). Hasil analisis sementara (n = 15) disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana (Sementara, n = 15)

No	Uraian	Nilai	Sig.	Keterangan
1.	Konstanta (a)	11,312	0,017	Signifikan
2.	Koefisien regresi komunikasi (b)	0,259	0,493	Tidak signifikan (t = 0,705)
3.	R Square (R^2)	0,037	-	Pengaruh 3,7%
4.	F hitung (ANOVA)	0,497	0,493	Tidak signifikan

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2026.

Nilai R sebesar 0,192 dan R Square sebesar 0,037 menunjukkan bahwa komunikasi menjelaskan 3,7% variasi implementasi BLT, sedangkan 96,3% berkaitan dengan faktor lain di luar model. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 11,312 + 0,259X; koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan searah, yaitu setiap kenaikan satu satuan skor komunikasi diikuti kenaikan skor implementasi BLT sebesar 0,259.

Uji t menghasilkan t hitung 0,705 dengan signifikansi 0,493, sedangkan t tabel (α = 0,05; df = 13) sekitar 2,160. Karena t hitung lebih kecil daripada t tabel dan signifikansi lebih besar dari 0,05, H0 tidak dapat ditolak, sehingga pengaruh komunikasi terhadap implementasi BLT belum terbukti signifikan secara statistik. Uji F menghasilkan F hitung 0,497 dengan signifikansi 0,493, lebih kecil daripada F tabel sekitar 4,667 (df1 = 1; df2 = 13), sehingga model regresi belum signifikan. Hasil ini bersifat sementara karena hanya menggunakan 15 responden dan skor variabel yang belum lengkap.

Hasil sementara menunjukkan komunikasi pemerintah desa berada pada kategori baik, terutama pada intensitas sosialisasi dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa komunikasi yang jelas dan konsisten membantu pelaksana dan masyarakat sasaran memahami tujuan serta prosedur

kebijakan. Meski demikian, banyaknya responden yang masih ragu-ragu terhadap keterbukaan informasi dan transparansi penetapan penerima BLT mengindikasikan bahwa komunikasi yang berlangsung belum sepenuhnya menjawab persoalan yang dikemukakan pada latar belakang, yakni komunikasi satu arah dan musyawarah desa yang belum optimal (Putri & Nurmandi, 2021; Rahman & Syamsuddin, 2022).

Pada implementasi BLT, ketepatan waktu penyaluran menjadi indikator dengan capaian tertinggi, sedangkan ketepatan prosedur dan transparansi penetapan penerima memperoleh capaian lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa aspek teknis penyaluran relatif berjalan baik, tetapi keterbukaan dan keadilan proses penetapan penerima masih perlu diperkuat. Kategori akhir komunikasi dan implementasi BLT belum dapat dipastikan karena analisis menyeluruh membutuhkan data 25 responden dan seluruh butir instrumen. Pembahasan ini karenanya dibaca sebagai gambaran awal.

Analisis regresi sementara menunjukkan koefisien positif tetapi tidak signifikan (Sig. 0,493 > 0,05; R Square 3,7%). Artinya, pada data sementara, tinggi-rendahnya komunikasi pemerintah desa belum terbukti menjelaskan perbedaan implementasi BLT. Hasil ini dapat dipahami dari dua sisi. Pertama, menurut Van Meter dan Van Horn (1975), komunikasi hanya salah satu dari beberapa variabel; kejelasan standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana juga menentukan keberhasilan implementasi, sehingga 96,3% variasi implementasi BLT berkaitan dengan faktor di luar komunikasi. Kedua, analisis baru memakai 15 dari 25 responden dan sebagian butir instrumen, sehingga kekuatan uji rendah dan hasilnya dapat berubah setelah data lengkap dianalisis.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu jumlah responden yang kecil (populasi 25 penerima BLT), data analisis yang belum lengkap, dan hasil uji kualitas instrumen pada data sementara yang perlu diperiksa kembali. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan data lengkap dan mempertimbangkan variabel lain dalam model Van Meter dan Van Horn.

E. KESIMPULAN

Komunikasi pemerintah desa dalam pelaksanaan BLT Dana Desa di Desa Bila Riase, yang diukur melalui kejelasan informasi, konsistensi informasi, dan intensitas komunikasi, pada rekapitulasi sementara berada pada kategori baik (rata-rata 75,4%). Namun, masih terdapat keraguan responden terhadap keterbukaan informasi dan transparansi penetapan penerima. Implementasi BLT Dana Desa, yang ditinjau dari ketepatan waktu, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan prosedur, dan pencapaian tujuan program, pada rekapitulasi sementara berada pada kategori baik (rata-rata 75,2%), dengan ketepatan waktu penyaluran sebagai indikator tertinggi dan ketepatan prosedur sebagai yang terendah. Berdasarkan hasil sementara, komunikasi belum berpengaruh signifikan terhadap implementasi BLT (Y = 11,312 + 0,259X; Sig. 0,493 > 0,05; R Square 3,7%), sehingga H0 tidak dapat ditolak. Hasil ini perlu diuji ulang dengan data lengkap 25 responden.

Pemerintah desa perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi mengenai persyaratan, jadwal, prosedur, dan dasar penetapan penerima BLT melalui musyawarah desa yang partisipatif, sedangkan peneliti selanjutnya disarankan menggunakan data lengkap serta mempertimbangkan variabel lain di luar komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hidayat, R. (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai sebagai Instrumen Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin. *Jurnal Administrasi Publik, 12*(1), 45–58.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Penanganan Dampak Sosial Ekonomi melalui Bantuan Sosial.

Putri, D. A., & Nurmandi, A. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Permasalahan Komunikasi Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8*(1), 45–58.

Rahman, A., & Syamsuddin. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa pada Penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 5*(2), 101–115.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tanujaya, B., Prahmana, R. C. I., & Mumu, J. (2023). Likert Scale in Social Sciences Research: Problems and Difficulties. *FWU Journal of Social Sciences, 16*(4), 45–62.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society, 6*(4), 445–488.